



RENCANA KERJA PERUBAHAN

TAHUN 2025

**KECAMATAN
MUARA WIS**

JL. PATIN RT.08 MUARA WIS

email: kec.muarawis@gmail.com



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KECAMATAN MUARA WIS

Jalan Patin No. 33 RT VIII Desa Muara Wis

Website : muarawis.kutaikartanegarakab.go.id email: kec.muarawis@gmail.com Kodepos. 75559

KEPUTUSAN CAMAT MUARA WIS KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR :B-43/CMT.MW/000.8.2.6/02/2025

TENTANG TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUN 2026 DAN RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 KECAMATAN MUARA WIS KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang : 1. Bahwa Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 telah ditetapkan oleh Camat Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa Rancangan RENSTRA Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, perlu dijabarkan dalam Rencana Tahunan yaitu Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Muara Wis;
3. Bahwa sehubungan dengan hal-hal di atas, maka perlu Tim Penyusun RENJA Tahun 2026 dan Renja Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara, yang perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
2. Undang-undang Republik Indonesia No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 Tentang

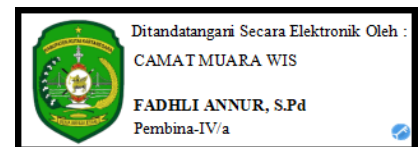
- Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Kecamatan;
9. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 247/SK-BUP/HK/2021 tentang Pelaksanaan Tugas Camat dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat;
 10. Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor : B-1383/ 065.11/ BAPP/ 2025 tanggal 11 Februari 2025 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah tahun 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Rencana Kerja Tahun 2026 dan Perubahan Renja Tahun 2025 Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara, merupakan Dokumen Perencanaan untuk Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan Tahun 2025;
- KEDUA : Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 dan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan Camat Muara Wis;
- KETIGA : Menunjuk Aparatur Sipil Negeri (ASN) yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja (RENJA) tahun 2026 dan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2025 di Lingkungan Kecamatan Muara Wis;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Muara Wis

Pada Tanggal : 14 Februari 2025

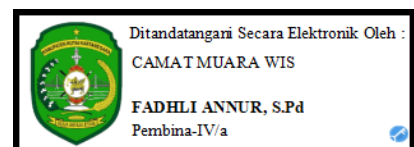


Daftar : Lampiran Surat Keputusan Camat Muara Wis
 Nomor : B-43/CMT.MW/000.8.2.6/02/2025
 Tentang : Penetapan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Muara Wis
 Tahun 2025

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	FADHLI ANNUR, S.Pd	CAMAT	PENANGGUNG JAWAB
2	RUSDIANTO, S.Pd, MM	SEKRETARIS CAMAT	KETUA
3	MUHAMAD KHOIRUL AFIF, S.Kom	KASUBBAG PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN	SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA
4	EMA PUSPITA SARI, S.Sos	KASUBBAG UMUM KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN	ANGGOTA
5	ABDUL JABAR, S.Pd	KASI PEMERINTAHAN	ANGGOTA
6	HANAFAI, S.Pdi	KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	ANGGOTA
7	NORIANA	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	ANGGOTA
8	DEDI ISKANDAR	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA
9	MAHMUDIN	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA

Ditetapkan di : Muara Wis

Pada Tanggal : 14 Februari 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Swt atas limpahan rahmat dan karunianya hingga tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Tahun Anggaran 2025.

Renja Perubahan Kecamatan Muara Wis tahun 2025 adalah dokumen perencanaan tahunan yang berisi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh kecamatan pada tahun 2025, dengan mempertimbangkan perubahan atau penyesuaian dari rencana awal. Dokumen ini menjadi pedoman bagi kecamatan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pelayanan publik.

Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara diharapkan dapat dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan secara optimal, tak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini. Perlu disadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini, oleh karena itu masukan serta saran kami harapkan guna penyempurnaan dimasa mendatang.

Atas masukan serta saran yang positif dan membangun disampaikan terima kasih.

Muara Wis, 25 Agustus 2025

Camat Muara Wis


FADHLI ANNUR, S.Pd
Pembina/ IV.a
NIP. 197106051996031004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	1
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II	5
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT SAMPAI DENGAN TRIWULAN II	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah.....	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.	12
BAB III.....	14
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	14
3.1 Program dan Kegiatan	14
BAB IV.....	22
PENUTUP	22

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renja Perubahan Kecamatan Muara Wis tahun 2025 adalah dokumen perencanaan tahunan yang berisi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh kecamatan pada tahun 2025, dengan mempertimbangkan perubahan atau penyesuaian dari rencana awal. Dokumen ini menjadi pedoman bagi Kecamatan Muara Wis dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pelayanan publik.

Renja Perubahan Kecamatan Muara Wis ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis.

Hal tersebut merupakan pilihan yang telah menjadi komitmen bersama sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama sama antara pemerintah daerah, DPRD, kelompok-kelompok masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut proses pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan hasil-hasilnya. Dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan adalah merupakan instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Dengan kata lain perencanaan pembangunan yang baik akan dapat menghasilkan pembangunan yang baik yang dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan Hukum Kecamatan dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286).
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244) Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676).
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.
8. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang SIPD.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2005 – 2025.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.
14. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kecamatan.
15. Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor B-3054/BAPP/065.11/07/2025 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Muara Wis memiliki maksud dan tujuan utama untuk menyesuaikan rencana kerja tahunan dengan perkembangan situasi dan kondisi yang ada, serta memastikan keselarasan dengan kebijakan pembangunan yang lebih luas. Renja Perubahan juga menjadi dasar untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKPA) serta memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Perangkat Daerah.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana Tindak Lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan triwulan II. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi anggaran Perangkat Daerah yang mencakup program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Muara Wis sampai dengan triwulan II Tahun 2025 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Muara Wis sampai dengan triwulan II Tahun 2025 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Kecamatan Muara Wis Tahun 2025 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Muara Wis Tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Muara Wis sampai dengan triwulan II Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2025 DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN MUARA WIS

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2025 (Akhir Periode)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran sd dengan tahun 2024 (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2025)						Catatan Penting	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD sd tahun berjalan (2025)	
						Target Renja PD Tahun 2025 (n-1)		Realisasi Renja PD s/d TW II		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7		8		9=(8/7)x100		10	11=(6+8)	12=(11/5)x100
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	65	49,83	64	9.057.757.630	57,6	3.007.006.140	89,95	33,20		57,57	88,57
1,1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	81	48	17	605.000.000	6	19.456.400	35,29	3,22		65	80,25
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	11	6	3	140.000.000	0	7.020.000	-	5,01		9	81,82
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5	3	1	5.000.000	1	3.680.000	100,00	73,60		4	80,00
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	5	3	1	5.000.000	0	566.400	-	11,33		4	80,00
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Laporan	45	27	9	70.000.000	1	0	11,11	-		36	80,00

		Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
1.1.5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	1	1	60.000.000	1	0	100,00	-		2	40,00
1.1.6	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah	Jumlah Data Statistik Sektorial Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	200	0	200	300.000.000	0	2.340.000	-	0,78		200	100,00
1.1.7	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara	25	0	25	25.000.000	25	5.850.000	100,00	23,40		25	100,00
1,2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	100	60	20	4.695.731.524	10	2.417.210.954	50,00	51,48		80	80,00
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	1860	1116	372	4.562.211.524	186	2.389.790.954	50,00	52,38		1488	80,00
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	3	1	25.000.000	1	2.340.000	100,00	9,36		4	80,00
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	65	39	13	83.520.000	6	23.910.000	46,15	28,63		52	80,00
1.2.4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan	5	3	1	25.000.000	1	1.170.000	100,00	4,68		4	80,00
1,3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	Dokumen	23	12	7	255.000.000	6	14.880.000	85,71	5,84		19	82,61
1.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	0	1	25.000.000	0	0	-	-		1	100,00
1.3.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	0	1	150.000.000	0	0	-	-		1	100,00
1.3.3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1	0	1	50.000.000	0	4.680.000	-	9,36		1	100,00
1.3.4	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	20	4	4	30.000.000	2	10.200.000	50,00	34,00		8	40,00
1,4	Administrasi Kepegawaian	Jumlah pegawai yang mendapatkan	Orang	155	93	31	200.000.000	31	0	100,00	-		124	80,00

	Perangkat Daerah	pelayanan Administrasi Kepegawaian												
1.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	100	50	50	50.000.000	0	0	-	-		100	100,00
1.4.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	15	5	10	100.000.000	0	0	-	-		15	100,00
1.4.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	155	93	31	50.000.000	0	0	-	-		124	80,00
1,5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jenis	45	27	9	703.039.578	6	157.194.274	66,67	22,36		36	80,00
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	5	4	1	7.500.000	0	0	-	-		5	100,00
1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	5	4	1	34.539.578	1	21.215.274	100,00	61,42		5	100,00
1.5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	10	8	2	50.000.000	1	16.250.000	50,00	32,50		10	100,00
1.5.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	10	8	2	8.000.000	1	724.000	50,00	9,05		10	100,00
1.5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	20	12	4	8.000.000	1	1.000.000	25,00	12,50		16	80,00
1.5.6	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	30	18	6	120.000.000	3	10.225.000	50,00	8,52		24	80,00
1.5.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	36	12	375.000.000	6	98.240.000	50,00	26,20		48	80,00
1.5.8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	2	1	50.000.000	0	9.540.000	-	19,08		3	75,00
1.5.9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	4	2	1	50.000.000	0	0	-	-		3	75,00
1,6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Diadakan	Unit	11	11	11	1.574.000.000	11	81.984.600	100,00	5,21		22	200,00
1.6.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	100	60	6	300.000.000	0	0	-	-		66	66,00
1.6.2	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	25	15	5	1.274.000.000	0	81.984.600	-	6,44		20	80,00
1,7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyelesaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	12	554.986.528		266.097.912	-	47,95		24	200,00
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	5	3	1	5.000.000	1	0	100,00	-		4	80,00

1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	36	12	284.400.000	6	116.113.892	50,00	40,83		48	80,00
1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	36	12	265.586.528	6	149.984.020	50,00	56,47		48	80,00
1,8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit	140	28	28	470.000.000	28	50.182.000	100,00	10,68		56	40,00
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	30	18	6	150.000.000	3	24.864.000	50,00	16,58		24	80,00
1.8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	100	60	20	20.000.000	10	3.340.000	50,00	16,70		80	80,00
1.8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	6	2	300.000.000	0	21.978.000	-	7,33		8	80,00
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	100	100	100	12.309.702.000	100	1.057.123.740	100,00	8,59		100	100,00
2,1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	Kegiatan	7	3	2	400.000.000	0	680.000	-	0,17		5	71,43
2.1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	4	0	2	150.000.000	0	680.000	-	0,45		2	50,00
2.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	5	3	1	250.000.000	0	0	-	-		4	80,00
2,2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	SPM	5	3	1	120.000.000	0	5.560.000	-	4,63		4	80,00
2.2.1	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	3	1	20.000.000	0	0	-	-		4	80,00
2.2.2	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	Laporan	4	0	2	100.000.000	0	5.560.000	-	5,56		2	50,00

		Kecamatan												
2,3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	kegiatan	10	6	2	11.789.702.000	1	1.050.883.740	50,00	8,91		8	80,00
2.3.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	20	12	4	789.702.000	2	254.587.000	50,00	32,24		16	80,00
2.3.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	290	174	58	11.000.000.000	0	796.296.740	-	7,24		232	80,00
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	Persen	100	100	100	686.000.000	50	210.805.000	50,00	30,73		100	100,00
3,1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Dilaksanakan	Kegiatan	10	6	2	200.000.000	1	35.860.000	50,00	17,93		8	80,00
3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga kemasyarakatan	25	15	5	50.000.000	5	35.860.000	100,00	71,72		20	80,00
3.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	15	9	3	150.000.000	0	0	-	-		12	80,00
3,2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kegiatan	2	0	1	486.000.000	1	174.945.000	100,00	36,00		1	50,00
3.2.1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga kemasyarakatan	10	0	5	486.000.000	2	174.945.000	40,00	36,00		5	50,00
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase kegiatan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	Persen	100	100	100	175.000.000	0	17.500.000	-	10,00		100	100,00
4,1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan	5	3	1	175.000.000	0	17.500.000	-	10,00		4	80,00
4.1.1	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	10	6	2	175.000.000	0	17.500.000	-	10,00		8	80,00
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen	100	100	100	370.000.000	0	0	-	-		100	100,00
5,1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	Kegiatan	5	3	1	370.000.000	0	0	-	-		4	80,00

	Penugasan Kepala Daerah													
5.1.1	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Orang	250	150	50	370.000.000	0	0	-	-		200	80,00

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara, merupakan Perangkat Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan. Pencanangan pembangunan yang berkualitas dan professional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada (potensi lokal). Di sisi lain, kondisi era globalisasi merupakan tantangan besar yang harus dan langsung dihadapi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara. Investor asing memiliki kebebasan penuh untuk membuka usaha di manapun sesuai peruntukannya, dan ini merupakan peluang pembangunan yang patut diraih dan dimanfaatkan dengan bijaksana.

Terkait dengan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Muara Wis, terdapat 4 (empat) indikator kinerja yang ditentukan untuk mengukur kinerja Kecamatan Muara Wis, yaitu :

- a. Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan;
- b. Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti;
- c. Persentase Capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- d. Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa (Khusus Kecamatan yang memiliki Desa);

Tabel 3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Muara Wis
Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2025

Perangkat Daerah : Kecamatan Muara Wis

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD					Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisa
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa			5%	5,5%	6%	6,5%	7%	195%	-7%	21%	6,5%	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Kecamatan Muara Wis merupakan salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (PD) sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Muara Wis sebagai Perangkat Daerah pelaksana teknis kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Camat mempunyai fungsi ; Menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan di Kecamatan dan pembinaan Kelurahan/Desa; Pembinaan ketentraman dan ketertiban; Pembinaan pemberdayaan masyarakat; Pembinaan kesejahteraan rakyat; Pembinaan pelayanan umum.

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
 - a) Pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Muara Wis diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati Kutai Kartanegara terpilih nantinya. Sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Muara Wis merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Bupati terpilih nantinya.
 - b) Pencapaian SDGs.
 - c) Pengentasan kemiskinan.
 - d) Pencapaian SPM.

- e) Pendayagunaan potensi ekonomi daerah.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan, antara lain meliputi:
 - Jumlah Program sebanyak 5 Program dengan 14 Kegiatan dan 35 sub kegiatan.
 - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Muara Wis dan melingkupi semua Desa.
 - Total kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp. 21.360.582.157,00.
- c. Tabel rencana program, kegiatan dan subkegiatan perubahan sebagaimana format table berikut ini:

Tabel. 4
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Perangkat Daerah : Kecamatan Muara Wis

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Indikator Kinerja	Target Capaian	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Target Capaian	Lokasi	Pagu Indikatif		Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	8	7	9	3	14	13	15	15	14	15
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	64 Nilai		9.057.757.630	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	64 Nilai		8.307.307.965	(750.449.665)	64 Nilai	8.307.307.965
1,1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 Dokumen		605.000.000	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 Dokumen		304.088.800	(300.911.200)	22 Dokumen	304.088.800
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Muara Wis	140.000.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Muara Wis	59.658.400	(80.341.600)	3 Dokumen	59.658.400
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Muara Wis	5.000.000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Muara Wis	5.000.000	0	1 Dokumen	5.000.000
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Muara Wis	5.000.000	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Muara Wis	5.000.000	0	1 Dokumen	5.000.000
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	Muara Wis	70.000.000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	Muara Wis	28.030.700	(41.969.300)	3 Laporan	28.030.700
1.1.5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Muara Wis	60.000.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Muara Wis	22.814.700	(37.185.300)	1 Laporan	22.814.700
1.1.6	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah	Jumlah Data Statistik Sektorial Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	200 Data	Muara Wis	300.000.000	Jumlah Data Statistik Sektorial Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	200 Data	Muara Wis	171.575.000	(128.425.000)	200 Data	171.575.000
1.1.7	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan	25 Berita Acara	Muara Wis	25.000.000	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan	25 Berita Acara	Muara Wis	12.010.000	(12.990.000)	25 Berita Acara	12.010.000

	Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
1,2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	20 Laporan		4.695.731.524	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	20 Laporan		4.678.402.724	(17.328.800)	20 Laporan	4.678.402.724
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	372 Orang/Bulan	Muara Wis	4.562.211.524	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	372 Orang/Bulan	Muara Wis	4.562.211.524	0	372 Orang/Bulan	4.562.211.524
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Muara Wis	25.000.000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Muara Wis	9.411.200	(15.588.800)	1 Laporan	9.411.200
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	Muara Wis	83.520.000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	Muara Wis	95.640.000	12.120.000	13 Laporan	95.640.000
1.2.4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan	Muara Wis	25.000.000	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan	Muara Wis	11.140.000	(13.860.000)	1 Laporan	11.140.000
1,3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	16 Dokumen		255.000.000	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	16 Dokumen		110.783.500	(144.216.500)	16 Dokumen	110.783.500
1.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Muara Wis	25.000.000	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Muara Wis	8.212.500	(16.787.500)	1 Dokumen	8.212.500
1.3.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Muara Wis	150.000.000	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Muara Wis	37.282.400	(112.717.600)	1 Dokumen	37.282.400
1.3.3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	Muara Wis	50.000.000	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Muara Wis	24.488.600	(25.511.400)	1 Laporan	24.488.600
1.3.4	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	Muara Wis	30.000.000	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	Muara Wis	40.800.000	10.800.000	4 Laporan	40.800.000
1,4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian	31 Orang		200.000.000	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian	31 Orang		119.340.000	(80.660.000)	31 Orang	119.340.000
1.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	Muara Wis	50.000.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	Muara Wis	50.000.000	0	50 Paket	50.000.000
1.4.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	Muara Wis	100.000.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	Muara Wis	45.000.000	(55.000.000)	10 Orang	45.000.000

1.4.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	31 Orang	Muara Wis	50.000.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	31 Orang	Muara Wis	24.340.000	(25.660.000)	31 Orang	24.340.000
1,5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah	9 Jenis		703.039.578	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah	9 Jenis		524.957.178	(178.082.400)	9 Jenis	524.957.178
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	Muara Wis	7.500.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	Muara Wis	7.500.000	0	1 paket	7.500.000
1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	Muara Wis	34.539.578	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	Muara Wis	21.493.578	(13.046.000)	1 paket	21.493.578
1.5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Muara Wis	50.000.000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Muara Wis	50.000.000	0	2 Paket	50.000.000
1.5.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Muara Wis	8.000.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Muara Wis	4.764.400	(3.235.600)	2 Paket	4.764.400
1.5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4 Dokumen	Muara Wis	8.000.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4 Dokumen	Muara Wis	8.000.000	0	4 Dokumen	8.000.000
1.5.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	Muara Wis	120.000.000	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	Muara Wis	104.428.000	(15.572.000)	6 Laporan	104.428.000
1.5.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Muara Wis	375.000.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Muara Wis	283.800.000	(91.200.000)	12 Laporan	283.800.000
1.5.8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Muara Wis	50.000.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Muara Wis	21.971.200	(28.028.800)	1 Dokumen	21.971.200
1.5.9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Muara Wis	50.000.000	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Muara Wis	23.000.000	(27.000.000)	1 Dokumen	23.000.000
1,6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Diadakan	11 Unit		1.574.000.000	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Diadakan	11 Unit		1.544.749.235	(29.250.765)	11 Unit	1.544.749.235
1.6.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	Muara Wis	300.000.000	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	Muara Wis	270.749.235	(29.250.765)	6 Unit	270.749.235
1.6.2	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Muara Wis	1.274.000.000	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Muara Wis	1.274.000.000	0	5 Unit	1.274.000.000
1,7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan		554.986.528	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan			554.986.528	0		554.986.528
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Muara Wis	5.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Muara Wis	5.000.000	0	1 Laporan	5.000.000

1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Muara Wis	284.400.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Muara Wis	284.400.000	0	12 Laporan	284.400.000
1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Muara Wis	265.586.528	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Muara Wis	265.586.528	0	12 Laporan	265.586.528
1,8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	28 Unit		470.000.000	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	28 Unit		470.000.000	0	28 Unit	470.000.000
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	Muara Wis	150.000.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	Muara Wis	150.000.000	0	6 Unit	150.000.000
1.8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	Muara Wis	20.000.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	Muara Wis	20.000.000	0	20 Unit	20.000.000
1.8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Muara Wis	300.000.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Muara Wis	300.000.000	0	2 Unit	300.000.000
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100 Persen		12.309.702.000	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100 Persen		12.020.575.992	(289.126.008)	100 Persen	12.020.575.992
2,1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	2 Kegiatan		400.000.000	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	2 Kegiatan		319.538.000	(80.462.000)	2 Kegiatan	319.538.000
2.1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	Muara Wis	150.000.000	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	Muara Wis	97.400.000	(52.600.000)	2 Laporan	97.400.000
2.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	Muara Wis	250.000.000	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	Muara Wis	222.138.000	(27.862.000)	1 Dokumen	222.138.000
2,2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	1 SPM		120.000.000	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	1 SPM		60.004.000	(59.996.000)	1 SPM	60.004.000
2.2.1	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah	1 Laporan	Muara Wis	20.000.000	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah	1 Laporan	Muara Wis	10.500.000	(9.500.000)	1 Laporan	10.500.000

		Kecamatan				Kecamatan						
2.2.2	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	Muara Wis	100.000.000	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	Muara Wis	49.504.000	(50.496.000)	2 Laporan	49.504.000
2,3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	2 kegiatan		11.789.702.000	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	2 kegiatan		11.641.033.992	(148.668.008)	2 kegiatan	11.641.033.992
2.3.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan	Muara Wis	789.702.000	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan	Muara Wis	677.998.992	(111.703.008)	4 Laporan	677.998.992
2.3.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	58 Laporan	Muara Wis	11.000.000.000	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	58 Laporan	Muara Wis	10.963.035.000	(36.965.000)	58 Laporan	10.963.035.000
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	100 Persen		686.000.000	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	100 Persen		594.958.200	(91.041.800)	100 Persen	594.958.200
3,1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Dilaksanakan	2 Kegiatan		200.000.000	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Dilaksanakan	2 Kegiatan		174.500.000	(25.500.000)	2 Kegiatan	174.500.000
3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga kemasya katan	Muara Wis	50.000.000	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga kemasya katan	Muara Wis	50.000.000	0	5 Lembaga kemasya katan	50.000.000
3.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	Muara Wis	150.000.000	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	Muara Wis	124.500.000	(25.500.000)	3 Laporan	124.500.000
3,2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan		486.000.000	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan		420.458.200	(65.541.800)	1 Kegiatan	420.458.200
3.2.1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga kemasya katan	Muara Wis	486.000.000	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga kemasya katan	Muara Wis	420.458.200	(65.541.800)	5 Lembaga kemasya katan	420.458.200
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	100 Persen		175.000.000	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	100 Persen		100.872.000	(74.128.000)	100 Persen	100.872.000
4,1	Koordinasi Upaya	Jumlah kegiatan dalam Upaya	1 Kegiatan		175.000.000	Jumlah kegiatan dalam Upaya	1 Kegiatan		100.872.000	(74.128.000)	1 Kegiatan	100.872.000

	Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						
4.1.1	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	Muara Wis	175.000.000	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	Muara Wis	100.872.000	(74.128.000)	2 Laporan	100.872.000
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100 Persen		370.000.000	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100 Persen		336.868.000	(33.132.000)	100 Persen	336.868.000
5,1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	1 Kegiatan		370.000.000	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	1 Kegiatan		336.868.000	(33.132.000)	1 Kegiatan	336.868.000
5.1.1	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50 Orang	Muara Wis	370.000.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50 Orang	Muara Wis	336.868.000	(33.132.000)	50 Orang	336.868.000
					22.598.459.630				21.360.582.157	(1.237.877.473)		21.360.582.157

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan (Renja) Kecamatan Muara Wis Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Muara Wis Tahun 2021-2026 yang mengacu pada Visi dan Misi Bupati Kutai Kartanegara dan mengacu pada evaluasi RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Muara Wis yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Kecamatan Muara Wis. Renja sebagai pedoman bagi pemerintah Kecamatan Muara Wis di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan.

Tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Muara Wis Tahun 2025 serta diselaraskan dengan Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 harus bisa diimplementasikan. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Kecamatan Muara Wis Tahun 2025 diinput dengan berpedoman kepada Renja Perubahan Kecamatan Muara Wis Tahun 2025 dan Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Perubahan Kecamatan Muara Wis Tahun 2025, harus dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2025.

Rencana Kerja Perubahan (Renja) Kecamatan Muara Wis selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk

tahun 2024 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Muara Wis. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Kecamatan Muara Wis Tahun 2025 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan / pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Disamping itu Renja Kecamatan Muara Wis juga memberikan umpan balik (*feed back*) dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh pimpinan sehingga diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik. Semoga keberadaan Renja Kecamatan Muara Wis ini dapat menjadi acuan rencana pembangunan demi tercapainya visi dan misi Kecamatan Muara Wis serta memberikan manfaat bagi proses perencanaan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Muara Wis, 25 Agustus 2025
Camat Muara Wis



FADHLI ANNUR, S.Pd
Pembina/ IV.a

NIP. 197106051996031004